RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

KATA PENGANTAR

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pambangunan Nasional dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja). Dalam prosesnya Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja SKPD) merupakan awal penyusunan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Ranwal RKPD Tahun 2024.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) merupakan langkah awal guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kediri, Agustus 2023

Plt.
Kepala BPKAD
Kabupaten Kediri

MUHAMAD ERFIN FATONI, S.E., M.Acc.
NIP. 19830208 201001 1 007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
BAB I 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 2
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II 10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 10
Tabel 2.1 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD 34
Tabel 2.2 37
Tabel 2.3 44
Tabel 2.4 49
BAB III 50
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 50
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKAD 51
3.3 Program dan Kegiatan 52
Tabel 2.5 53
BAB VI 65
BAB V 66
A. Catatan Penting 66
B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 66
C. Rencana Tindak Lanjut 66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024 merupakan rancangan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Ranwal RKPD, merupakan rancangan awal yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Ranwal RKPD Tahun 2024. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dokumen Ranwal Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2024, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri menjalankan fungsi penunjang keuangan merumuskan arah dan tujuan penyusunan Rencana Strategis berdasarkan MISI ke-2 yaitu Reformasi Birokasi dan Pelayanan Publik. Misi ke-2 tersebut mempunyai tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan sasaran :

1. Membangun institusional penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan bersih;
2. Meningkatkan Profisionalisme ASN;
3. Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik.

Sesuai Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kediri 2021 – 2026, salah satu indikator ketercapaiannya dalam sasaran pertama tersebut (Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih) adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga BPKAD Kabupaten Kediri menetapkan tujuan "Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah" dengan indikatornya Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri selama Tahun 2021- 2026. Sedangkan sasarannya adalah "Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Aset Daerah".

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan pada Rancangan Awal Renja akan dihimpun dan di sampaikan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja.

SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kediri.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan SKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024

Dasar hukum penyusunan Rencana kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri adalah :

a. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri;
b. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas;
c. Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri tahun 2024.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang penyusunan Rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024, proses penyusunan Rencana kerja, keterkaitan antara Rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Perintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 serta susunan garis besar isi dokumen serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri tahun-tahun sebelumnya;

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri, dampak capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program Nasional/Internasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri;

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat telaahan terhadap usulan program dan kegiatan yang bersifat *bottom-up*. Usulan tersebut bisa dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun perguruan tinggi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu:

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri;

3.3 Program dan Kegiatan

Pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untu memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam pembangunan daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Pada bagian ini, diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi, Perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten/Kota lainnya.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri (Evaluasi Renja SKPD) Tahun 2022 merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input dan output sebagaimana telah tertuang pada dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya.

Pelaksanaan evaluasi Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 dan pencapaian kinerja Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD secara umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKAD

DAN PENCAPAIAN RENSTRA BPKAD S/D TAHUN 2022 KABUPATEN KEDIRI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)x100	9	10 = 5+7+9	11=(10/4)x100
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten yang tersusun**	**100%**	**133%**	**100%**	**169,73%**	**169,73**	**100%**	**402,73%**	**402,73**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**85,71%**	**100%**	**50%**	**50**	**100%**	**235,71%**	**235,71**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	9 dokumen	300
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan SKPD Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	200
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	2 dokumen	200
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	2 dokumen	200
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	300	1 dokumen	4 dokumen	400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	0 Laporan	0	3 laporan	6 laporan	200
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat, Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	0 Laporan	0	4 laporan	8 laporan	200
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**99,53%**	**100%**	**57,73%**	**57,73**	**100%**	**257,26%**	**257,26**
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan, Tunjangan ASN	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	100	24 dokumen	72 dokumen	300
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi, Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	36 dokumen	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan, Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan, Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 dokumen	350 dokumen	350 dokumen	0 dokumen	0	350 dokumen	700 dokumen	200
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan, Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	24 dokumen	200
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 Laporan	100	5 laporan	10 laporan	200
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	2 dokumen	100
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	18 Laporan	100	18 laporan	54 laporan	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis, Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis, Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	300
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**150%**	**100%**	**150%**	**150**	**100%**	**400%**	**400**
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik, Daerah pada SKPD	2 laporan	3 laporan	2 laporan	3 Laporan	150	2 laporan	8 laporan	400
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**29,71%**	**100%**	**119,24%**	**119,24**	**100%**	**248,95%**	**248,95**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi, Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan, Administrasi Kepegawaian	45 dokumen	0 dokumen	45 dokumen	79 dokumen	175,56	45 dokumen	124 dokumen	275,56
5.02.01.2.05.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan FungsiMonitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja, Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan, Penilaian Kinerja Pegawai	45 dokumen	0 dokumen	45 dokumen	40 dokumen	88,89	45 dokumen	85 dokumen	188,89
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 orang	40 orang	45 orang	5 orang	11,11	45 orang	90 orang	200
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 orang	1 orang	3 orang	41 orang	1366,67	3 orang	45 orang	1500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**99,39%**	**100%**	**492,07%**	**492,07**	**100%**	**691,46%**	**691,46**
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang, Disediakan	2 paket	5 paket	2 paket	4 paket	200%	2 paket	11 paket	550
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan, yang Disediakan	2 paket	3 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	7 paket	350
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	288 dokumen	288 dokumen	288 dokumen	1584 dokumen	550	288 dokumen	2160 dokumen	750
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan, Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	18 laporan	24 laporan	24 Laporan	100	24 laporan	66 laporan	275
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis, pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	24 dokumen	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**100%**	**400%**	**100%**	**200%**	**200**	**100%**	**700%**	**700**
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	0 laporan	1 laporan	0 laporan	0	1 laporan	1 laporan	100
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan, Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	8 laporan	1 laporan	4 laporan	400	1 laporan	13 laporan	1300
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**68%**	**100%**	**119,7%**	**119,7**	**100%**	**287,7%**	**287,7**
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	8 unit	10 unit	19 unit	190	10 unit	37 unit	370

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	1 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	21 unit	210
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	25 unit	30 unit	31 unit	103,33	30 unit	86 unit	286,67
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**1. Ketepatan waktu penyusunan KUA PPAS dan KUPA PPAS Kabupaten Kediri** **2. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPABD Kabupaten Kediri** **3. Prosentase penerbitan SP2D tepat waktu** **4. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan** **5. Ketepatan waktu penyampaian rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD**	**100**	**104,51%**	**100%**	**164,37%**	**164,37**	**100%**	**368,88%**	**368,88**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun**	**100%**	**159,60%**	**100%**	**116,62%**	**116,62**	**100%**	**376,22%**	**376,22**
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	200	1 dokumen	3 dokumen	300
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan, Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan, Perubahan PPAS yang Disusun	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	200	1 dokumen	3 dokumen	300
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-, SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 dokumen	150 dokumen	65 dokumen	0 dokumen	0	65 dokumen	215 dokumen	330,76
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi, Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	65 dokumen	0 dokumen	65 dokumen	0 dokumen	0	65 dokumen	65 dokumen	100
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-, SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	65 dokumen	135 dokumen	65 dokumen	195 dokumen	0	65 dokumen	395 dokumen	607

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi, Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	65 dokumen	65 dokumen	65 dokumen	65 dokumen	100	65 dokumen	195 dokumen	300
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah, tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	200	2 dokumen	14 dokumen	700
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	300
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta, Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan, Bidang Anggaran	6 dokumen	2 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	14 dokumen	233,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja, Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan, Anggaran Belanja Daerah	12 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	8,33	12 dokumen	13 dokumen	108,33
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan, Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	65 dokumen	195 dokumen	65 dokumen	130 dokumen	200	65 dokumen	390 dokumen	600
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase dokumen perbendaharaan yang diterbitkan**	**100%**	**151,59%**	**100%**	**82,02%**	**80,82**	**100%**	**333,61%**	**333,61**
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan, Pengelolaan Kas Daerah	12 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	24 dokumen	200
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	260 dokumen	461 dokumen	260 dokumen	234 dokumen	90	260 dokumen	955 dokumen	367,31

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan, dan Dana Transfer Lainnya	12 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	12 dokumen	100
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 dokumen	29 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	53 dokumen	441,67
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil	36 dokumen	0 dokumen	36 dokumen	0 dokumen	0	36 dokumen	36 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan, Instansi Terkait	12 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	12 dokumen	100
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah, Kabupaten/Kota	65 SKPD	65 SKPD	65 SKPD	65 SKPD	100	65 SKPD	195 SKPD	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun**	**100%**	**106,81%**	**100%**	**124,41%**	**124,41**	**100%**	**331,22%**	**331,22**
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan, Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 dokumen	13 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	36 dokumen	300
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	65 BA	65 BA	65 BA	133 BA	204,61	65 BA	263 BA	404,62
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 laporan	28 laporan	18 laporan	18 laporan	100	18 laporan	54 laporan	355,56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	67 laporan	137 laporan	67 laporan	53 laporan	79,10	67 laporan	257 laporan	383,58
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	200	2 dokumen	12 dokumen	600
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan,	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan,	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	2 dokumen	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi, Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi, Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	300
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	65 SKPD	0 SKPD	65 SKPD	67 SKPD	103,07	65 SKPD	132 SKPD	203,07

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD, Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali	9 kali	300
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**400%**	**100**	**100%**	**600%**	**600**
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan, Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan, Penyaluran Bantuan Keuangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	4 laporan	400	1 laporan	6 laporan	600
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat, dan Mendesak	1 laporan	1 laporan	1 laporan	4 laporan	400	1 laporan	6 laporan	600
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah**	**Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah**	**100%**	**4,55%**	**0%**	**0%**	**0**	**100%**	**100%**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Daerah Lingkup Keuangan Daerah	**Lingkup Keuangan Daerah**								
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah, Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	400	1 dokumen	8 dokumen	800
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	65 SKPD	0 SKPD	0 SKPD	0 SKPD	0	65 SKPD	65 SKPD	100
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**1. Prosentase tanah dan/atau bangungan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang diserahkan**	**100**	**104,51%**	**100%**	**164,37%**	**164,37**	**100%**	**368,88%**	**368,88**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kepada Bupati melalui pengelola **2. Prosentase perangkat daerah yang entri belanja modal tepat waktu** **3. Prosentase tanah yang berada pada pengelola barang yang bersertifikat** **4. Prosentase perangkat daerah yang dilakukan validasi data aset**								
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	300	1 dokumen	7 dokumen	700
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	2 dokumen	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang, Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik, Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	12 dokumen	300
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik, Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik, Daerah	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	200	1 dokumen	6 dokumen	600
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik, Daerah	12 dokumen	23 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	47 dokumen	391,67
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang, Milik Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik, Daerah	10 dokumen	92 dokumen	10 dokumen	13 dokumen	130	10 dokumen	115 dokumen	1150
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik, Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 dokumen	26 dokumen	5 dokumen	6 dokumen	120	5 dokumen	37 dokumen	740
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 kali	0 kali	12 kali	0 kali	0	12 kali	12 dokumen	100
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik, Daerah	4 dokumen	28 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	36 dokumen	900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	65 BA	65 BA	65 BA	57 BA	87,69	65 BA	65 BA	287,69
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang, Disusun	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	3 laporan	300
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan, Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	65 SKPD	65 SKPD	65 SKPD	65 SKPD	100	65 SKPD	195 SKPD	300

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang Keuangan melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi tersebut di atas, menyelenggarakan fungsi :

a. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah melaksanakan fungsi:
   - koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
   - koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
   - penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
   - penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
   - mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
   - mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
   - mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
   - penyediaan anggaran kas; dan
   - melaksanakan evaluasi APBD kabupaten/kota (khusus untuk perangkat daerah provinsi).
b. Bidang Perbendaharaan Daerah melaksanakan fungsi:
   - mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
   - mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
   - mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
   - mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan danatransfer lainnya;
   - mengoordinasikan penempatan uang daerah denganmembuka rekening kas umum daerah;
   - mengoordinasikan pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
   - mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincianpenggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
   - mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaandan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
   - mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;

- mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansiterkait;
- mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ); dan
- mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembaIian kelebihan penerimaan.

c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah melaksanakan fungsi:
- pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah; pengoordinasian kegiatan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi;
- pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsidan Kabupaten/Kota;
- pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja sertapembiayaan;
- penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial; dan
- pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah.

d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah melaksanakan fungsi:
- mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- melaksanakan penatausahaan barang milik daerah; mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

- mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
- meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahandan penghapusan barang milik daerah;
- mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barangmilik daerah dari SKPD; dan
- mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang Kedua, yaitu Reformasi Birokasi dan Pelayanan Publik. Kontribusi pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPKAD KABUPATEN KEDIRI

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	I K K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri, terdapat beberapa isu penting yang perlu adanya penyelesaian, pembentukan langkah dan arah kebijakan dalam mengatasinya, antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Belum optimalnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku;
3. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam Pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Masih terbatasnya SDM yang berlatarbelakang pendidikan tentang pengelolaan keuangan;
2. Sering terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah;
3. Masih terbatasnya SDM dalam penguasaan perkembangan teknologi informasi.

Keberadaan BPKAD sebagai leading sector pengelolaan keuangan dan aset di daerah, memiliki tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset yang tertib, akuntabel dan optimal sehingga mendukung optimalisasi pembangunan daerah. Selain itu BPKAD berkewajiban menjadi motor bagi terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pencapaian pendapatan, tata kelola keuangan dan asset daerah yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam proses pelaksanaan tugas BPKAD diharapkan tercapai kondisi sebagai berikut :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas antar SKPD dan instansi serta stakeholders lainnya dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagai upaya menciptakan kondisi yang diinginkan, maka peningkatan kualitas BPKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

2.3.1. Identifikasi Permasalahan dan Hambatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri, terdapatbeberapa permasalahan dan hambatan, antara lain sebagai berikut :

1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Adanya lembaga/instansi yang masih memiliki keinginan (egosektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada;
3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi BPKAD serta masih kurangnya disiplin kerja;
4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi;
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya kesempatan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.3.2. Dampak terhadap pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri terhadap pencapaian program Nasional / Internasional

Sesuai dengan visi misi pembangunan Kabupaten Kediri periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokasi yang Melayani".**

Dalam pencapaian visi tersebut, Kabupaten Kediri memiliki 9 kunci yang harus dilaksanakan yang tertuang didalam misi Kabupaten Kediri yaitu :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius
2. Reformasi Birokasi dan Pelayanan Publik
3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah
4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar wilayah
6. Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal
7. Optimalisasi tata kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana
8. Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda
9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Misi Kepala Daerah yang ke 2 (dua) tersebut mempunyai tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan sasaran :

1. Membangun institusional penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan bersih;
2. Meningkatkan Profisionalisme ASN;
3. Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik

Sesuai Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026, salah satu indikator ketercapaiannya dalam sasaran pertama tersebut (Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih) adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga BPKAD Kabupaten Kediri menetapkan tujuan **"Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah"** dengan indikatornya Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri selama Tahun 2021-2026.

Melanjutkan reformasi birokrasi dengan sasaran pokok Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih dengan indikator yaitu Peningkatan Nilai SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat, Opini BPK dan Indeks Persepsi Anti Korupsi sangat terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai badan pelaksana fungsi penunjang bidang Keuangan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal dan berkualitas merupakan faktor penting dalam pencapaian Misi Kepala Daerah yang ke-2.

Program kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Kediri diatas adalah :

1. Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
9. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
10. Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah;
12. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah; dan
13. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.3.3. Tantangan dan Peluang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri

Tantangan dan peluang yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri antara lain :

TANTANGAN

1. Perubahan peraturan perundang-undangan terkait keuangan daerah;
2. Audit intern belum dapat seluruhnya membantu SKPD agar terhindar dari temuan-temuan audit eksternal;
3. Kelemahan dalam pemahaman atas regulasi pengelolaan aset daerah;
4. Adanya tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik termasuk informasi

PELUANG

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;

2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/ Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kediri serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kabupaten Kediri disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi;
3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Kabupaten Kediri diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.3.4. Isu-isu Strategis

Sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Kepala BPKAD Kabupaten Kediri, yang mempunyai tugas koordinasi antara lain di bidang:

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
b. Penyusunan Rancangan APBD / Perubahan APBD;
c. Penyusunan Raperda APBD / Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
f. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebagai tindak lanjut, atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memfasilitasi penyusunan Raperda APBD / Perubahan APBD rencana program dan

kegiatan, belanja daerah Kabupaten Kediri diarahkan untuk mengurangi berbagai isu strategis antara lain kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan lingkungan hidup. Penerapan isu-isu strategis tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai bidang dan urusan masing-masing serta kondisi riil.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam dalam rancangan akhir RKPD 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 3 Program, 8 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kediri, sebagai berikut :

Tabel 2.3
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 KABUPATEN KEDIRI

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**Persentase dokumen penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten yang tersusun**	**100%**	**7.514.539.500**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**Persentase dokumen penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten yang tersusun**	**100%**	**7.514.539.500**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	13.376.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	13.376.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	100%	6.846.036.700	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	100%	6.846.036.700	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	8.160.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	8.160.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	127.347.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	127.347.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	193.004.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	193.004.400	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100%	73.453.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100%	73.453.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	98.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	98.000.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	158.162.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	158.162.400	
II	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**1. Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu 2. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 3. Ketepatan waktu penyusunan KUA**	**TEPAT WAKTU**	**306.305.866.600**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**1. Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu 2. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 3. Ketepatan waktu penyusunan KUA**	**TEPAT WAKTU**	**306.305.866.600**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			PPAS dan KUPA PPAS Kabupaten Kediri **4. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPABD Kabupaten Kediri** **5. Ketepatan waktu penyampaian rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD**					**PPAS dan KUPA PPAS Kabupaten Kediri** **4. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPABD Kabupaten Kediri** **5. Ketepatan waktu penyampaian rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD**			
9	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang tersusun	100%	1.477.044.600	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang tersusun	100%	1.477.044.600	
10	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen perbendaharaan yang diterbitkan	100%	484.155.800	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen perbendaharaan yang diterbitkan	100%	484.155.800	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun	100%	1.422.828.200	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun	100%	1.422.828.200	
12	Penunjang Urusan Kewenangan	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen Penunjang Urusan	100%	302.798.850.000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen Penunjang Urusan	100%	302.798.850.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Keuangan Daerah		Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
13	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	122.955.000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	122.955.000	
III	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**1. Prosentase tanah dan/atau bangungan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang diserahkan kepada Bupati melalui pengelola 2. Prosentase perangkat daerah yang entri belanja modal tepat waktu 3. Prosentase tanah yang berada pada pengelola barang yang bersertifikat 4. Prosentase perangkat daerah yang**	**100%**	**1.295.028.400**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**1. Prosentase tanah dan/atau bangungan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang diserahkan kepada Bupati melalui pengelola 2. Prosentase perangkat daerah yang entri belanja modal tepat waktu 3. Prosentase tanah yang berada pada pengelola barang yang bersertifikat 4. Prosentase perangkat daerah yang**	**100%**	**1.295.028.400**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dilakukan validasi data aset					**dilakukan validasi data aset**			
14	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen pengelolaan BMD yang tersusun	100%	1.295.028.400	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	Persentase dokumen pengelolaan BMD yang tersusun	100%	1.295.028.400	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri tidak menerima usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri pada tahun yang direncanakan (2024), serta rekapitulasi program dan kegiatan prakiraan maju tahun 2024.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsesus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Kediri menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan pembangunan daerah.

3.1.2. Arah Kebijakan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Insklusif melalui Kerja Sama dan Semangat Gotong Royong".

Untuk menunjang tercapainya visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunya misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah;
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris, memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan; dan
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKAD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang Keuangan. Tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
c. pelaksanaan bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
f. pembinaan penyelenggaraan bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
g. pelaksanaan administrasi bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodic kepada Bupati; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.2.1. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hal yang akan dicapai / dihasilkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri dalam jangka waktu tahunan.

Sasaran merupakan bagian integral dari proses Perencanaan Strategis dan menggambarkan tindakan - tindakan/ aktivitas yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dengan

memberikan penekanan terhadap penggunaan Sumber Daya yang dimiliki secara efisien, efektif dan ekonomis. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Aset Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2024, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri melaksanakan 3 Program, 14 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan dengan lokasi di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Kediri, Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Dalam melaksanakan program dan kegiatan dimaksud, membutuhkan dana / pagu indikatif sebesar Rp. 315.115.401.500,- (Tiga Ratus Lima Belas Milyar Seratus Lima Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan maju tahun 2025
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri

SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								
01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah yang tersusun**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**100 %**	**13.376.000**	PAD		**100 %**	**52.898.920**
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perenanaan perangkat daerah yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	3 dokumen	2.712.000	PAD		3 dokumen	8.340.820
01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	1.808.000	PAD		1 dokumen	6.928.400
01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yangtersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	2.520.000	PAD		1 dokumen	6.298.400
01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	704.000	PAD		1 dokumen	5.299.620
01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yangtersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	2.816.000	PAD		1 dokumen	5.299.620
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	3 dokumen	704.000	PAD		3 dokumen	10.674.590

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	4 dokumen	2.112.000	PAD		4 dokumen	9.427.470
01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**100 %**	**6.846.036.700**	PAD		**100 %**	**7.496.905.560**
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Ds. Doko Kec. Ngasem	24 dokumen	6.392.798.000	PAD		24 dokumen	7.004.662.000
01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersedia	Ds. Doko Kec. Ngasem	12 dokumen	433.312.700	PAD		12 dokumen	451.312.700
01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	350 dokumen	2.574.000	PAD		350 dokumen	2.550.000
01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi	Ds. Doko Kec. Ngasem	12 dokumen	4.404.000	PAD		12 dokumen	7.968.860
01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir SKPD yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	5 laporan	4.366.000	PAD		5 laporan	14.070.710
01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	18 dokumen	7.524.000	PAD		18 dokumen	9.412.890
01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	1.058.000	PAD		1 dokumen	6.928.400

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah**	**Persentase dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**100 %**	8.160.000	PAD		**100 %**	48.863.360
01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan BMD pada SKPD yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	2 dokumen	8.160.000	PAD		2 dokumen	48.863.360
01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**100 %**	**124.347.000**	PAD		**100 %**	**173.774.450**
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ds. Doko Kec. Ngasem	4 paket	42.975.000	PAD		45 pegawai	90.000.000
01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang terdata dan terkelola	Ds. Doko Kec. Ngasem	45 pegawai	4.216.000	PAD		45 pegawai	6.618.450
01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	45 dokumen	9.616.000	PAD		45 dokumen	9.616.000
01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai uang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ds. Doko Kec. Ngasem	45 pegawai	19.540.000	PAD		45 pegawai	19.540.000
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan yang terlaksana	Ds. Doko Kec. Ngasem	3 kali	48.000.000	PAD		3 kali	48.000.000
01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**100 %**	**193.004.400**	PAD		**100 %**	**249.127.430**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 paket	41.859.500	PAD		1 paket	50.000.000
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 paket	4.158.100	PAD		1 paket	5.000.000
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Ds. Doko Kec. Ngasem	2 paket	43.952.800	PAD		2 paket	43.952.800
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaanyang tersedia	Ds. Doko Kec. Ngasem	2 paket	16.194.000	PAD		2 paket	16.194.000
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Ds. Doko Kec. Ngasem	288 exemplar	7.320.000	PAD		288 exemplar	7.320.000
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terselenggara	Ds. Doko Kec. Ngasem	24 kali	75.920.000	PAD		24 kali	112.695.000
01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen panatusahaan Arsip Dinamis yang tersedia	Ds. Doko Kec. Ngasem	12 bulan	3.600.000	PAD		12 bulan	3.600.000
01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahyang tersedia**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**100 %**	**73.453.000**	PAD		**100 %**	**120.073.000**
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ds. Doko Kec. Ngasem	10 unit	12.403.000	PAD		1 unit	12.403.000
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Ds. Doko Kec. Ngasem	13 unit	61.050.000	PAD		1 unit	107.670.000
01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**100 %**	**98.000.000**	PAD		**100 %**	**98.500.000**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen Jasa Surat Menyurat yang tersedia	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	500.000	PAD		1 dokumen	1.000.000
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen Jasa Pelayanan UmumKantor yang tersedia	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	97.500.000	PAD		1 dokumen	97.500.000
01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahyang terpelihara**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**100 %**	**158.162.400**	PAD		**100 %**	**158.162.400**
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	Ds. Doko Kec. Ngasem	10 unit	97.500.000	PAD		10 unit	97.500.000
01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	Ds. Doko Kec. Ngasem	10 unit	5.000.000	PAD		10 unit	5.000.000
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Ds. Doko Kec. Ngasem	30 unit	55.000.000	PAD		30 unit	55.000.000
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ds. Doko Kec. Ngasem	4 unit	662.400	PAD		30 unit	662.400
02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**								
02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**100 %**	**1.447.044.600**	PAD		**100 %**	**4.775.658.400**
02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	110.018.000	PAD		1 dokumen	110.018.000
02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	114.130.000	PAD		1 dokumen	255.214.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	Ds. Doko Kec. Ngasem	65 dokumen	16.861.500	PAD		65 dokumen	88.520.300
02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	Ds. Doko Kec. Ngasem	65 dokumen	29.667.600	PAD		65 dokumen	108.809.500
02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerahtentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBDdan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	2 dokumen	554.106.500	PAD		2 dokumen	1.854.163.000
02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran PerubahanAPBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	2 dokumen	539.891.000	PAD		2 dokumen	868.129.600
02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan BidangAnggaran yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	6 regulasi	74.170.000	PAD		6 regulasi	1.241.877.000
02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Ds. Doko Kec. Ngasem	12 kali	8.640.000	PAD		12 kali	26.524.500
02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi Perencanaan AnggaranBelanja Daerah yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	12 kali	11.280.000	PAD		12 kali	36.290.000
02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Ds. Doko Kec. Ngasem	12 kali	10.640.000	PAD		12 kali	36.325.000
02.2.01.0013	Pembinaan Penganggaran Daerah PemerintahKabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang diberikan PembinaanPenganggaran Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	65 SKPD	8.640.000	PAD		65 SKPD	419.787.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase dokumen perbendaharaanyang diterbitkan**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**100 %**	**484.155.800**	PAD		**100 %**	**1.455.306.000**
02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan KasDaerah yang terlaksana	Ds. Doko Kec. Ngasem	12 kali	65.895.800	PAD		12 kali	158.779.000
02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen Anggaran Kas dan SPDyang diterbitkan	Ds. Doko Kec. Ngasem	260 Dokumen	263.210.000	PAD		260 Dokumen	141.929.820
02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangandan Dana Transfer Lainnya yang terlaksana	Ds. Doko Kec. Ngasem	12 kali	40.082.400	PAD		12 kali	117.041.110
02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Pemantauan Transaksi Non Tunaidengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang terlaksana	Ds. Doko Kec. Ngasem	12 kali	18.816.200	PAD		12 kali	255.754.690
02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan danPengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	36 laporan	9.990.000	PAD		36 laporan	200.689.810
02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas	Ds. Doko Kec. Ngasem	12 dokumen	34.415.000	PAD		12 dokumen	511.170.110

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terkait	SP2D dengan Instansi Terkait							
02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang diberikan PembinaanPenatausahaan Keuangan Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	65 SKPD	51.746.400	PAD		65 SKPD	69.941.460
02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi danPelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase dokumen akuntansi danpelaporan keuangan daerah yang tersusun**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**100 %**	**1.422.828.200**	PAD		**100 %**	**1.422.828.200**
02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaandan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen Akuntansi Penerimaandan Pengeluaran Kas Daerah yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	12 dokumen	39.456.300	PAD		12 dokumen	39.456.300
02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi danVerifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Ds. Doko Kec. Ngasem	65 BA	50.240.700	PAD		65 BA	50.240.700
02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanandan Semesteran yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	18 laporan	142.332.400	PAD		18 laporan	142.332.400
02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUDdan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerahyang terkonsolidasi	Ds. Doko Kec. Ngasem	67 SKPD	163.287.200	PAD		67 SKPD	163.287.200
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan	Jumlah dokumen Rancangan PeraturanDaerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan	Ds. Doko Kec.	2 dokumen	794.468.600	PAD		2 dokumen	794.468.600

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.2.03.0005	Peraturan KepalaDaerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	Ngasem						
02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDyang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	3.181.500	PAD		1 dokumen	3.181.500
02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan TeknisOperasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan dan PanduanTeknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	14.227.200	PAD		1 dokumen	14.227.200
02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	13.605.800	PAD		1 dokumen	13.605.800
02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dilakukan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	65 SKPD	134.678.000	PAD		65 SKPD	134.678.000
02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pengelolaan KeuanganBLUD Kabupaten/Kota yang terlaksana	Ds. Doko Kec. Ngasem	3 Kali	67.350.500	PAD		3 Kali	67.350.500
02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase dokumen Penunjang UrusanKewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**100 %**	**302.798.850.000**	**PAD**		**100 %**	**302.798.850.000**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran BantuanKeuangan	Jumlah dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	277.798.850.000	PAD		1 dokumen	277.798.850.000
02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dokumen Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	25.000.000.000	PAD		1 dokumen	25.000.000.000
02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi SistemInformasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**100 %**	**122.955.000**	PAD		**100 %**	**506.853.250**
02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	8.855.000	PAD		1 aplikasi	98.000.000
02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah yang digunakan dan dipelihara	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 aplikasi	106.000.000	PAD		1 aplikasi	137.810.150
02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dilakukan PembinaanSistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	65 SKPD	8.100.000	PAD		65 SKPD	271.043.100
03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIKDAERAH**								
03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase dokumen pengelolaan BMDyang tersusun**	**Ds. Doko Kec. Ngasem**	**100 %**	**1.295.028.400**	**PAD**		**100 %**	**1.295.028.400**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Draft Keputusan Bupati tentangStandar Harga yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	197.419.000	PAD		1 dokumen	197.419.000
03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Draft Keputusan Bupati tentang Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	390.100	PAD		1 dokumen	390.100
03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan KebutuhanBarang Milik Daerah yang tersusun	Ds. Doko Kec. Ngasem	4 dokumen	2.320.200	PAD		4 dokumen	2.320.200
03.2.01.0004	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	1 dokumen	10.308.500	PAD		1 dokumen	10.308.500
03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan BarangMilik Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	12 dokumen	236.713.500	PAD		12 dokumen	236.713.500
03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Inventarisasi Barang MilikDaerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	2 dokumen	45.373.000	PAD		2 dokumen	45.373.000
03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengamanan BarangMilik Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	10 dokumen	349.953.000	PAD		10 dokumen	349.953.000
03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penilaian Barang MilikDaerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	5 dokumen	341.153.000	PAD		5 dokumen	341.153.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Ds. Doko Kec. Ngasem	12 kali	3.595.000	PAD		12 kali	3.595.000
03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	4 dokumen	53.929.200	PAD		4 dokumen	53.929.200
03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang MilikDaerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	65 BA	38.993.900	PAD		65 BA	38.993.900
03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	3 laporan	6.800.000	PAD		3 laporan	6.800.000
03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik DaerahPemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dilakukan PembinaanPengelolaan Barang Milik Daerah	Ds. Doko Kec. Ngasem	65 SKPD	8.080.000	PAD		65 SKPD	8.080.000

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri mengajukan 3 program, 14 kegiatan, dan 81 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan beserta anggaran yang diusulkan di Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan usulan anggaran Rp 7.514.539.500,- yang terdiri dari 8 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan usulan anggaran Rp 306.305.833.600,- yang terdiri dari 5 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan usulan anggaran Rp 1.295.028.400,- yang terdiri dari 1 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan.

Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan pada Tahun 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp 304.212.423.856,-. Anggaran pada Tahun 2024 Rp 315.115.401.500,- sedangkan untuk Tahun anggaran 2023 sebesar Rp 619.327.825.356. Penurunan anggaran tersebut sebagai salah satu respon dari adanya SILPA Tahun 2023 yang dapat diartikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah terdapat efisiensi anggaran. Adanya penurunan dikarenakan akibat tidak terserapnya secara maksimal di Tahun Anggaran 2023.

BAB V
PENUTUP

A. Catatan Penting

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka panjangsebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMDKabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi pemangku kewenangan yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikandalam penyusunan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran aktif dari seluruh potensi pemangku kewenangan bidang keuangan dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehinggaperan dan tanggung jawab para pihak dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Renja Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2021 - 2016 dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024. Selanjutnya penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap Program dan Kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

C. Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan didasarkan pada Renja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Renja berfungsi sebagai guideline pelaksanaan kinerja, dengan memperhatikan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap tercapainya indikator tujuan dan sasaran. Selanjutnya, apabila terdapat kendala dalam upaya pencapaian kinerja indikator yang telah ditetapkan tersebut, baik dikarenakan belum memadainya anggaran/pendanaan maupun permaslahan teknis lainnya, dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian melalui perubahan rencana kerja (Renja Perubahan). Demikian Rencana Kerja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri tahun 2024 yang telah kami susun, untuk mencapai tujuan dan sasaran dan digunakan sebagaimana mestinya.

Rencana tindak lanjut program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2024 menetapkan 3 program, 14 kegiatan, dan 81 Sub Kegiatan. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024.

Demikian Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri tahun 2024 yang telah kami susun berdasarkan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kediri, Agustus 2023

Plt **KEPALA BPKAD**
KABUPATEN KEDIRI

MUHAMAD ERFIN FATONI
Penata Tingkat I
NIP. 19830208 201001 1 007

BUPATI KEDIRI

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA